



## Rumah Sakit Pratama di Nusa Penida Pemprov Bali Anggarkan Rp 19 Miliar

Semarang (Bali Post) –

Rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama di Nusa Penida dipastikan berlanjut pada 2016. Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung saat ini sedang mempersiapkan tim yang lebih solid untuk menggarap proyek dengan anggaran sekitar Rp 19,8 miliar itu.

Kadis Kesehatan Kabupaten Klungkung Ni Made Adi Swapatni menegaskan, pihaknya akan melakukan *review* ulang rencana pembuatan RS Pratama tersebut sebelum dilanjutkan kembali tahun depan. "Kami segera lakukan itu, sehingga jadwal lelang ulang bisa cepat," ujar mantan Dirut RSU Klungkung tersebut, Jumat (30/10) kemarin.

Pada pengerjaan tahun depan, pihaknya tidak lagi mengandalkan anggaran pusat seperti 2014 lalu, sebab Kabupaten Klungkung mendapatkan

persetujuan untuk pengerjaan fisik RS Pratama dari Pemprov Bali. "Informasi terakhir Provinsi Bali menyetujui sekitar Rp 19 miliar, hanya untuk pembuatan gedung," tuturnya.

Untuk alat kesehatan, Adi Swapatni akan berupaya mengusulkannya ke pusat. Ini karena alat kesehatan yang dibutuhkan untuk mengisi RS Pratama memerlukan anggaran besar, sehingga berat bila dibebankan di APBD Klungkung. Di sisi lain, tanpa adanya alat kesehatan tersebut, RS Pratama tidak bisa dioperasikan.

Dengan dibangunnya RS Pratama, tenaga kesehatan yang dibutuhkan Kabupaten Klungkung akan semakin besar. Di sisi lain, daerah ini masih kekurangan dokter spesialis untuk ditempatkan di RSU Klungkung. "Kami akan pelajari dulu biar tidak salah jalan. Kami bakal hitung berapa dokter yang dibutuhkan," tambahnya. (dwa)

Edisi : Sabtu, 31 Oktober 2015

Hal : 10



Bali Post/ant

TOL - Kendaraan melaju di atas Tol Bali Mandara.

## Tol Bali Mandara Merugi Masyarakat Tombok Rp 3 Miliar Per Bulan

Denpasar (Bali Post) -

PT Jasamarga Bali Tol mengklaim Tol Bali Mandara merugi Rp 3 miliar per bulan, soalnya pendapatan jalan bebas hambatan itu tidak sesuai target. "Tiap bulan kami harus membayar Rp 13 miliar, tetapi kenyataannya kami baru mampu bayar Rp 10 miliar," kata Direktur Utama PT Jasamarga Bali Tol Akhmad Tito Karim di Denpasar, Jumat (30/10) kemarin.

Menurutnya, pembayaran utang yang masih kurang itu saat ini ditalangi pemegang saham dari Pemerintah Provinsi Bali dan Pemkab Badung yang menguasai 30% saham. "Artinya masyarakat Bali juga sekarang ikut nombok," imbuhnya.

Pembangunan jalan bebas hambatan pertama di Indonesia yang dibangun di atas perairan itu menelan

biaya Rp 2,5 triliun, yang bersumber dari 30% saham Pemprov Bali dan Pemkab Badung, serta 70% pinjaman Bank Mandiri, BNI, BCA, BRI, BTN dan BPD Bali sebesar Rp 1,7 triliun.

Dari total pinjaman dari pihak perbankan itu, setidaknya Jasamarga Bali Tol harus membayar utang per bulan sekitar Rp 13 miliar.

Tito Karim lebih lanjut

menjelaskan agenda bisnis 2015, pihaknya merencanakan 51 ribu kendaraan setiap hari melalui tol sepanjang sekitar 12,5 kilometer itu. Namun, selama 2015 rata-rata kendaraan yang melalui tol pertama di atas laut yang dibangun anak negeri itu baru 43 ribu.

"Masih jauh dari perkiraan, masih susah ini dan merugi," kata Akhmad Tito. (ant)

Edisi : Sabtu, 31 Oktober 2015

Hal : 18